



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang berisi pelaksanaan kegiatan pengawas internal yang dilakukan oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan panduan bagi Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas:

- a. Faktor Risiko Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 298 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025

NOMOR : 4 TAHUN 2025
 TANGGAL : 13 JANUARI 2025

**PENILAIAN 6 FAKTOR RISIKO UNIT ORGANISASI
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal		(6) Persentase Penyerapan Anggaran Eselon II		Jumlah Faktor Risiko	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Skor	Peringkat
1	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	3	Sedang	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	21	1
2	Pusat Data dan Informasi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	5	Sangat Tinggi	20	2
3	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	3	Sedang	3	Sedang	4	Tinggi	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	3	Sedang	18	3
4	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	5	Sangat Tinggi	17	4
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	3	Sedang	3	Sedang	17	5
6	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	4	Tinggi	4	Tinggi	1	Sangat Rendah	2	Rendah	3	Sedang	3	Sedang	17	6
7	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah	2	Rendah	17	7

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal		(6) Persentase Penyerapan Anggaran Eselon II		Jumlah Faktor Risiko	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Skor	Peringkat
8	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	3	Sedang	3	Sedang	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	16	8
9	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	4	Tinggi	15	9
10	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	2	Rendah	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	3	Sedang	15	10
11	Direktorat Sertifikasi Profesi	3	Sedang	3	Sedang	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	3	Sedang	15	11
12	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2	Rendah	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	14	12
13	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	13	13
14	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	2	Rendah	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	1	Sangat Rendah	13	14
15	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	3	Sedang	13	15

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal		(6) Persentase Penyerapan Anggaran Eselon II		Jumlah Faktor Risiko	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Skor	Peringkat
16	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	2	Rendah	12	16
17	Inspektorat	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	1	Sangat Rendah	10	17

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2025

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
1	Audit						
1.1	Audit Internal TIK SPBE	Pusat Data dan Informasi	5	40	1	April	Laporan
1.2	Audit Kinerja pada Sasaran Program 1 Meningkatnya Akses Pelaku UMK pada PBJ	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	5	40	1	April	Laporan
1.3	Audit Kinerja pada Sasaran Program 2 Meningkatnya jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	40	1	September	Laporan
1.4	Audit Kinerja pada Sasaran Program 3 Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	5	40	1	Juni	Laporan
1.5	Audit Kinerja pada Sasaran Program 6 Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	5	40	1	Maret	Laporan
1.6	Audit Kinerja pada Sasaran Program 7 Meningkatnya Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	5	40	1	Juni	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
1.7	Audit Ketaatan pada Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	5	40	1	Juni	Laporan
JUMLAH KEGIATAN AUDIT				280	7		
2							
2	Reviu						
2.1	Reviu atas Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	5	30	1	April	Laporan
2.2	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	5	30	1	Mei	Laporan
2.3	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	5	30	1	Juli	Laporan
2.4	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokatif Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	5	15	1	September	Laporan
2.5	Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027	Biro HUBungan Masyarakat dan Umum	4	10	1	Oktober	Laporan
2.6	Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri LKPP Tahun 2024	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri	5	20	1	Januari	Laporan
2.7	Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri	3	20	1	Februari	Laporan
2.8	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	20	1	Februari	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
2.9	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	20	1	Juni	Laporan
2.10	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	20	1	September	Laporan
2.11	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	20	1	Desember	Laporan
2.12	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2024 (Unaudited)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	6	30	1	Januari	Laporan
2.13	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	4	15	1	April	Laporan
2.14	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Semester I Tahun Anggaran 2025	Sekretariat Utama	6	30	1	Juli	Laporan
2.15	Reviu atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	6	20	1	Oktober	Laporan
2.16	Reviu atas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	5	10	1	Februari	Laporan
2.17	Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	6	20	1	Januari	Laporan
JUMLAH KEGIATAN REVIU				360	17		

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
3	Evaluasi						
3.1	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan IV Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Januari	Laporan
3.2	Evaluasi Internal atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General Tahap Perencanaan (Ex-Ante) di Lingkungan LKPP Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Februari	Laporan
3.3	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan I Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	April	Laporan
3.4	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan II Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Juli	Laporan
3.5	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan III Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Oktober	Laporan
3.6	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	4	30	1	Juli	Laporan
3.7	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	4	30	1	Juni	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
3.8	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	30	1	Mei	Laporan
3.9	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	4	30	1	Agustus	Laporan
3.10	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sekretariat Utama	4	30	1	Juni	Laporan
3.11	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Data dan Informasi	3	30	1	Agustus	Laporan
3.12	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	3	30	1	Juli	Laporan
3.13	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Inspektorat	3	30	1	Mei	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
3.14	Evaluasi atas Usulan Pembangunan Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	20	1	April	Laporan
3.15	Evaluasi atas Desain dan Penerapan Manajemen Risiko Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	20	1	Agustus	Laporan
3.16	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegritas di Lingkungan LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	20	1	April	Laporan
JUMLAH KEGIATAN EVALUASI				350	16		
4	Pemantauan						
4.1	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Juli	Laporan
4.2	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Desember	Laporan
4.3	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Maret	Laporan
4.4	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Juni	Laporan
4.5	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	September	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.6	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester IV Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Desember	Laporan
4.7	Pemantauan atas Tindak Lanjut Audit Keamanan SPBE	Pusat Data dan Informasi	3	5	1	Maret	Laporan
4.8	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Januari	Laporan
4.9	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	April	Laporan
4.10	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Juli	Laporan
4.11	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Oktober	Laporan
4.12	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Januari	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.13	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	April	Laporan
4.14	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Juli	Laporan
4.15	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Oktober	Laporan
4.16	Pemantauan atas Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LHKAN Pejabat/Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	5	1	April	Laporan
4.17	Pemantauan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester II Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Januari	Laporan
4.18	Pemantauan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Juli	Laporan
4.19	Pemantauan atas Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester II Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Januari	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.20	Pemantauan atas Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester I Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Juli	Laporan
4.21	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B24 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	3	5	1	Januari	Laporan
4.22	Pemantauan atas Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan I Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Maret	Laporan
4.23	Pemantauan atas Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan III Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Oktober	Laporan
JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN				135	23		
5 Konsultasi							
5.1	Pendampingan atas Kegiatan Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	60	1	Februari	Laporan
5.4	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	4	5	1	Maret	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
5.5	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II termasuk MR SPBE pada Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	4	5	1	Mei	Laporan
5.6	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	4	5	1	April	Laporan
5.7	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	4	5	1	Mei	Laporan
5.8	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Sekretariat Utama	Sekretariat Utama	4	5	1	Maret	Laporan
5.9	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II termasuk MR SPBE pada Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi	4	5	1	Mei	Laporan
5.10	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	4	5	1	Mei	Laporan
5.11	Pendampingan Penyusunan Pedoman Teknis Manajemen Risiko	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	30	1	Januari	Laporan
5.12	Fasilitasi atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	4	20	1	Oktober	Laporan
JUMLAH KEGIATAN KONSULTANSI				145	10		

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
6	Peningkatan Kapabilitas APIP						
6.1	Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025	Inspektorat	6	20	1	Mei	Laporan
6.2	Pemantauan atas Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan I Tahun 2025	Inspektorat	3	10	1	April	Laporan
6.3	Pemantauan atas Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan II Tahun 2025	Inspektorat	3	10	1	Juli	Laporan
6.4	Pemantauan atas Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan III Tahun 2025	Inspektorat	3	10	1	Oktober	Laporan
6.5	Pemantauan atas Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan IV Tahun 2025	Inspektorat	3	10	1	Desember	Laporan
	JUMLAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP			60	5		
7	Evaluasi Kebijakan dan Hasil Pengawasan Intern						

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
7.1	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2024 pada GT A	Inspektorat	4	20	1	Februari	Laporan
7.2	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2024 pada GT B	Inspektorat	4	20	1	Maret	Laporan
7.3	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2024 pada GT C	Inspektorat	4	20	1	Februari	Laporan
7.4	Penilaian Mandiri atas Telaah Sejawat Eksternal	Inspektorat	3	20	1	September	Laporan
	JUMLAH KEGIATAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN HASIL PENGAWASAN INTERN			80	4		
8	Penyusunan Pedoman Pengawasan Intern						
8.1	Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP	Inspektorat	6	20	1	Februari	Rancangan Pedoman
	JUMLAH KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAWASAN INTERN			20	1		
9	Perencanaan Pengawasan Intern						
9.1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun Anggaran 2026	Inspektorat	4	20	1	November	Rancangan PKPT

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
9.2	Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II di Inspektorat	Inspektorat	1	5	1	Maret	Rancangan Peta Risiko Inspektorat
	JUMLAH KEGIATAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN			25	2		
	JUMLAH KESELURUHAN			1455	85		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI